

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Hutan.....	9
2.2. Kehutanan	10
2.3. Prinsip Kebijakan dan Kebijakan Hutan	10
2.3.1. Definisi Kebijakan dan Kebijakan Hutan.....	10
2.3.2. Perspektif Kebijakan	12
2.4. Konsep Dasar Desentralisasi.....	17
2.4.1. Beberapa Pengertian Dasar	17
2.4.2. Arti Penting Desentralisasi.....	19
2.5. Otonomi Daerah di Indonesia.....	23
2.5.1. Pengertian Otonomi Daerah	23
2.5.2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah .	25
2.5.3. Perimbangan Keuangan.....	27
2.6. Konsep Dasar Pengelolaan SDH.....	29
2.6.1. Pengelolaan Hutan.....	29
2.6.2. Karakteristik SDH	31
2.6.3. Pengelolaan Hutan Lestari.....	33
2.6.4. Pengelolaan SDH Berbasis Masyarakat	37
2.7. Otonomi Daerah di Sektor Kehutanan	39
2.7.1. Dasar Hukum.....	39
2.7.2. Arti Penting Desentralisasi Pengelolaan SDH	43
2.7.3. Prasyarat Otonomi Daerah di Sektor Kehutanan.....	45
2.7.4. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan.....	46
2.7.5. Tafsir Beberapa Pihak Dalam Merespon Desentralisasi Kehutanan.....	50

2.7.6. Proses <i>Argumentative Turn</i> Antara Pihak-Pihak Terkait Di Tengah Isu Desentralisasi Pengelolaan Hutan	53
2.7.7. Persepsi.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1. Metode Dasar	58
3.2. Pelaksanaan Penelitian	58
3.3. Jenis dan Cara Pengambilan Data	59
3.5. Analisis Data	62
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	65
4.1. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah	65
4.2. Struktur Penggunaan Lahan	67
4.3. Struktur Wilayah Administrasi Pemerintahan Kab. Banyuwangi..	70
4.4. Kondisi Sosial dan Ekonomi	71
4.4.1. Struktur Kependudukan.....	71
4.4.2. Matrik Pengukuran Kinerja	72
4.4.3. Pembangunan Pendidikan	72
4.5. Kondisi Pemerintahan	73
4.6. Kondisi Iklim.....	79
4.7. Kehutanan	80
4.7.1. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya	80
4.7.2. Perkembangan Areal Hutan.....	80
4.7.3. Perkembangan Produksi Hasil Hutan.....	82
4.7.4. Perkembangan Pemasaran Hasil Hutan.....	82
BAB V HASIL PENELITIAN	83
5.1. Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintahan dan Penerapan Desentralisasi Bidang Kehutanan.....	83
5.2. Persepsi Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Hutan Negara Di Era Otonomi Daerah.....	89
5.3. Persepsi Perhutani Terhadap Pengelolaan Hutan Negara Di Era Otonomi Daerah.....	111
5.4. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Negara Di Era Otonomi Daerah	114
5.5. Persepsi Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Hutan Negara Oleh Perhutani.....	122
5.6. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Negara Oleh Perhutani	129
5.7. Desentralisasi Bidang Kehutanan Kabupaten Banyuwangi.....	133
5.8. Kebijakan Pembagian Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Negara	135

BAB VI PEMBAHASAN	139
6.1. Kondisi Kehutanan Kabupaten Banyuwangi	139
6.2. Dinamika Pelaksanaan Desentralisasi Pengelolaan SDH	144
6.2.1. Prioritas Pengelolaan	145
6.2.2. Peran Serta Masyarakat	149
6.2.3. Kontribusi Pendapatan	153
6.2.4. Penataan Kawasan	158
6.2.5. Bentuk Kelembagaan	162
6.3. Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	166
 BAB VII PENUTUP	 183
6.1. Kesimpulan	183
6.2. Saran	184
 DAFTAR PUSTAKA	 185
LAMPIRAN	186